

Penggunaan Situs Kemendesa.go.id sebagai Sumber Informasi Program Kemendesa: Studi Kasus di Kabupaten Bogor

Drina Intyaswati, Ahmad Zaki Abdullah, Puri Bestari Mardani
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan – Indonesia
Email: nanazain@gmail.com, Phone +62 21 7656971

How to Cite This Article: Intyaswati, D., Abdullah, A.Z., Mardani, P.B. (2018). Penggunaan Situs Kemendesa.go.id sebagai Sumber Informasi Program Kemendesa: Studi Kasus di Kabupaten Bogor. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3). doi: 10.25139/jsk.v2i3.847

Received: 02-05-2018,
Revision: 06-08-2018,
Acceptance: 21-08-2018,
Published online: 01-11-2018

English Title: Using Website kemendesa.go.id as the Information Source of Kemendesa's Programs: Case Study in Bogor District

Abstract *In order to improve the welfare of rural communities in Indonesia, development needs to be carried out in various aspects to catch up. Ministry of Rural as the ministry responsible for development in the village has socialized the program through website kemendesa.go.id. The website provides information about village priority programs, utilisation of village funds, village business entities, and village superior products. Studies conducted on the villages in the area of Bogor Regency conducted to see how the utilization of information resources from Ministry of Rural through the internet media. By interviewing officials from ten villages and observation of village infrastructure means that the information submitted by Ministry of Rural through the website kemendesa.go.id has not been well received by the village officials. Still needed support from the government especially the availability of facilities that support ease of internet access.*

Keywords: *ministry of rural; website; program*

Abstrak Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek guna mengejar ketertinggalannya. Kemendesa sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di desa sudah mensosialisasikan programnya melalui situs internet kemendesa.go.id. Situs tersebut memberikan informasi tentang program prioritas desa, pemanfaatan dana desa, badan usaha desa, dan produk unggulan desa. Studi yang

dilakukan terhadap desa-desa di kawasan Kabupaten Bogor dilakukan untuk melihat bagaimana pemanfaatan sumber informasi dari kemendesa melalui media internet. Dengan melakukan wawancara terhadap aparat dari sepuluh desa dan observasi terhadap sarana prasarana desa menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan Kemendesa melalui situs internet kemendesa.go.id belum diterima dengan baik oleh aparat desa. Masih diperlukan adanya dukungan dari pihak pemerintah khususnya ketersediaan sarana yang mendukung kemudahan dalam akses internet.

Kata Kunci: kemendesa; situs internet; program

PENGANTAR

Indonesia termasuk dalam golongan negara berkembang, dengan banyak desa-desa yang membutuhkan program pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya. Dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan menjadi kendala lagi berkaitan dengan komunikasi program-program pembangunan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) telah mengembangkan *website* Kemendesa.go.id untuk mensosialisasikan program-program pembangunan desa. *Website* tersebut menyajikan empat program prioritas Kemendesa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang meliputi: 1) Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), 2) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), 3) Embung Desa, dan 4) Sarana Olahraga Desa.

Hasil evaluasi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyimpulkan bahwa, selama tiga tahun, dana desa belum optimal mencapai beberapa tujuan yang seharusnya dicapai. Dana desa memang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan lini rasio di perdesaan tapi peningkatannya tidak masif, artinya *multiplier effect*-nya belum maksimal. Belum maksimalnya pemanfaatan dana desa tersebut berkaitan dengan bagaimana pengetahuan masyarakat desa, khususnya aparat desa, tentang informasi pembangunan desa melalui *website* kemendesa.go.id. Media berbasis internet dipilih karena media ini memungkinkan bagi desa-desa yang jauh dari ibukota untuk mengakses informasi dan berinteraksi dalam mengkomunikasikan pembangunan dan kendala yang ada di desanya.

Hasil dari sosialisasi peraturan perpajakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I (Puspitasari, 2013) menunjukkan bahwa penggunaan media internet semakin digemari karena kemudahannya untuk diakses, efektif dan efisien, fleksibel, serta tidak membutuhkan biaya pembuatan yang tinggi dan pengelolaannya lebih mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bagi masyarakat mencakup lima tahapan penerimaan inovasi (Sharon, 2017). Tahap pertama adalah adanya kesadaran dalam diri bahwa program tersebut penting. Tahap kedua adalah adanya niat untuk mencari informasi lebih mengenai program tersebut melalui penggunaan media massa baik secara sengaja atau tidak sengaja. Tahap ketiga adalah informasi yang di terima diolah dalam pikiran apakah akan bermanfaat dalam kehidupan. Tahap keempat adalah tahapan mencoba program. Tahap kelima adalah sudah mencoba sendiri manfaat program, memiliki pengalaman sendiri, dan memahami keberadaan informasi akan membantu pengalaman yang dialami.

Media sosial secara umum digunakan sebagai sarana yang strategis untuk komunikasi perusahaan yang dapat meningkatkan partisipasi dan kedekatan dengan *stakeholder* (Gomez, 2011). Melalui komentar dan umpan balik yang diberikan oleh pengguna media sosial, pemerintah dapat menarik perhatian publik tentang masalah dan kebijakan yang dikeluarkan (Soon, 2014) dan menemukan bahwa komunikasi dua arah tersebut akan membantu meningkatkan keefektifan organisasi (pemerintah) dan memperkuat dukungan warga masyarakat terhadap kebijakan selanjutnya. Keberadaan *digital divide* (kesenjangan antara orang-orang yang memiliki dan tidak memiliki akses fisik ke komputer dan internet) dapat menyebabkan kesenjangan kedua yang mencakup perbedaan dalam keterampilan menggunakan internet (van Dijk, 2010).

Dalam teori masyarakat informasi, masyarakat informasi dikenal dengan masyarakat zaman informasi (Castells, 1996). Castells menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi merupakan sarana adanya "dasar materi" untuk "perluasan *pervasive*" dari jejaring sosial organisasi pada struktur sosial (Sugihartati, 2014:39). *Pervasive* adalah suatu kondisi dimana

teknologi telah menyatu dengan pemakai teknologi serta lingkungan sehingga teknologi sendiri bukanlah sesuatu hal yang istimewa, teknologi telah menjadi bagian dalam kehidupan. Misalkan kegiatan menonton televisi bagi sebagian orang adalah bagian dari aktivitas sehari-hari, jika belum melihat televisi maka akan terasa ada satu kegiatan yang belum dilakukan pada hari tersebut. Ada enam hal yang dapat menggambarkan masyarakat informasi (Castells, 1996), yaitu:

Informasionalisme, aliran informasi dan teknologi komputer telah mengubah dunia dan menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Istilah informasionalisme adalah suatu mode perkembangan dimana optimalisasi penggunaan faktor produksi berbasis pengetahuan dan informasi menjadi sumber utama produktivitas, dan kekuatan modal bukan menjadi penentu utama. Penerapan pengetahuan dan informasi dapat menghasilkan suatu proses yang sifatnya akumulatif dan menghasilkan inovasi teknik yang berpengaruh terhadap organisasi sosial.

Masyarakat jaringan (*network society*), merupakan masa perkembangan masyarakat yang dipengaruhi perkembangan informasi dan teknologi. Diawali adanya revolusi industri di Amerika pada tahun 1970-an yang mengakibatkan perubahan yang luar biasa pada pengelolaan dan peran informasi yang selanjutnya melahirkan restrukturisasi mendasar pada sistem kapitalis yang disebut kapitalisme informasional. Selanjutnya muncul istilah masyarakat jaringan, adanya jaringan (*network*) memungkinkan komunikasi berjalan kesemua arah pada semua level dan struktur. Dengan keberadaan jaringan ini maka pemberdayaan masyarakat informasi pada semua lapisan masyarakat dapat dilakukan. Keberadaan jaringan memungkinkan individu-individu berhubungan satu sama lain, saling terbuka, dinamis, mampu berkembang kearah yang lebih baik. Keberadaan jaringan juga membuat kapitalisme semakin terorganisasi dan mendunia. Jaringan kerja dan komunikasi menjadi terintegrasi berkat adanya teknologi informasi.

Ekonomi internasional, terjadi dinamika perubahan bentuk ekonomi tradisional menjadi ekonomi baru yang dikenal

dengan ekonomi informasional dan global. Perekonomian ini adalah perekonomian perusahaan, perekonomian di suatu wilayah atau negara yang sumber produktivitas dan daya saingnya sangat tergantung pada dukungan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi pengolahan yang dimiliki, termasuk teknologi manajemen dan manajemen teknologi. Keberadaan ekonomi informasional global memberi keuntungan pada organisasi dan negara, ekonomi bersifat informasional karena daya saing dan produktifitas dari unit-unit ekonominya sangat tergantung kepada kapasitas mereka dalam menghasilkan, memproses, dan mengaplikasikan pengetahuan dan informasi secara efisien. Sifat ekonomi mengglobal karena memiliki unit-unit dengan kapasitas kerja yang *real time* pada skala dunia dan melewati batas-batas negara, yang didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi. Keberadaan ekonomi informasional dengan sifat globalnya memunculkan organisasi baru berbentuk perusahaan jaringan (*network enterprise*), dimana perusahaan memiliki sarana sistem yang dibangun dari titik temu sejumlah sistem otonom. Perwujudan dari kultur ekonomi informasional global berupa perusahaan jaringan yang memungkinkan transformasi tanda ke komoditas, seperti informasi dan pengetahuan. Jaringan yang terbentuk sebaiknya bersifat terbuka, dapat melakukan ekspansi tanpa batas, dinamis, dan dapat berinovasi tanpa merusak sistem.

Transformasi angkatan kerja, penggunaan teknologi dalam masyarakat informasi memiliki peranan penting dalam perubahan angkatan kerja. Perkembangan kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat informasi. Munculnya penggunaan teknologi dalam dunia kerja menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran terjadinya pengurangan tenaga kerja teknis karena dapat digantikan oleh teknologi, dan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran. Teknologi baru dalam bisnis membuka peluang otomatisasi operasional pekerjaan dan pengembangan jaringan, perusahaan dapat melakukan operasional diluar negeri atau melakukan subkontrak dengan perusahaan-perusahaan kecil dan bisa juga bersifat individual antara manajemen dengan pekerja untuk waktu dan jenis pekerjaan yang diharapkan. Di sisi lain perkembangan teknologi akan memberikan peluang jenis pekerjaan baru, menumbuhkan

jenis lapangan pekerjaan mandiri, pekerjaan kontrak, dan pekerjaan paruh waktu yang dapat mendatangkan bayaran yang lebih tinggi tergantung dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Kondisi tersebut berlaku bagi masyarakat yang melek teknologi informasi. Masyarakat dengan pendidikan dan tingkat ketrampilan yang rendah serta kemampuan penggunaan teknologi yang rendah akan mengalami ketertinggalan. Pada masyarakat informasi akan muncul berbagai profesi di bidang jasa pengolah informasi dan orang-orang dengan posisi bargaining yang tinggi karena kompetensinya di bidang teknologi informasi.

Global City, jaringan yang terjadi adalah serangkaian titik yang bisa merupakan orang, kota, bisnis, atau pemerintah, yang dihubungkan oleh arus informasi, arus uang, atau arus orang. Karakteristik dari *global city* adalah terjadi metamorfosis ruang-waktu, komunikasi global seolah membuat ruang menyusut. Waktu perjalanan membuat kita merasa jauh atau dekat terhadap suatu tempat tergantung pada jenis transportasi yang digunakan.

Cyberculture, teknologi yang berkembang pesat memberikan dampak munculnya suatu pola masyarakat baru. Disini bukan teknologi menciptakan suatu masyarakat akan tetapi teknologi merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Teknologi informasi baru tidak menyebabkan adanya transformasi sosial, akan tetapi tanpa teknologi proses menuju transformasi sosial tidak akan terjadi. Saat ini teknologi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat jaringan (*network society*). Komputer, teknologi jaringan, telekomunikasi, dan lainnya merupakan basis dari infrastruktur teknologi yang kita miliki saat ini. Akan tetapi tidak berarti dengan adanya teknologi tersebut semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan teknologi tersebut, bagaimana kompleksitas yang terjadi dengan munculnya teknologi, serta tantangan lain yang muncul dalam masyarakat dengan keberadaan teknologi. Masyarakat informasi telah membentuk struktur organisasi yang baru, kalau sebelumnya bentuk aktivitasnya terorganisasi secara vertikal, terstandarisasi, terstruktur secara hirarkis dan rasional, maka saat ini sudah bergeser menjadi masyarakat yang aktivitasnya

berjejaring. Pada akhir tahun 1990-an negara-negara maju membuat program dalam rangka pengembangan infrastruktur informasi modern yang disebut *information superhighway* yang selanjutnya merupakan cikal bakal munculnya dunia maya (*cyber-space*). Era revolusi informasi ditandai dengan munculnya perkembangan teknologi informasi, yang selanjutnya memunculkan kebudayaan virtual riil, kondisi ini merupakan sistem sosial budaya baru dan keberadaan realitas sepenuhnya merupakan tampilan maya, tampilan didalamnya tidak hanya tampak di layar tempat pengalaman dikomunikasikan tetapi menjadi pengalaman yang dirasakan sendiri. Dapat dikatakan di era masyarakat informasi realitas sosial telah mati, realitas yang ada merupakan realitas virtual, realitas dunia maya. Selanjutnya kehadiran kemajuan teknologi informasi juga melahirkan hal-hal yang bersifat virtual, seperti kebudayaan virtual dan komunitas virtual. Kehadiran revolusi informasi bersama dengan teknologi komunikasi dan media baru menggeser peran media-media konvensional, bahkan pada hal-hal tertentu media baru menunjukkan kelebihannya dibanding media konvensional. Perkembangan teknologi informasi memunculkan perubahan terhadap perilaku membaca, pencarian informasi lebih tergantung pada bahan digital dari pada bahan non digital. Teknologi digital mendasari infrastruktur komunikasi yang berguna untuk mentransmisi data dan menyimpan data. Jejaring sosial dan internet memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang jauh jaraknya dengan menggunakan facebook, email, skype, dan lainnya secara gratis. Internet juga menyediakan berbagai informasi yang dapat diunduh seperti musik, video, jurnal, dan lainnya.

Kemajuan teknologi informasi membentuk pola hidup masyarakat Indonesia mengikuti tren yang terbentuk dari globalisasi masyarakat informasi. Masyarakat informasi yang terbentuk di Indonesia termasuk dalam masyarakat transisi. Ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan masyarakat informasi (Beni, 2002), lima yang utama adalah kemajuan dalam pendidikan, perubahan dalam karakteristik pola kerja, perubahan dalam penyebaran pengetahuan dari cara primitif sampai penggunaan komputer, perubahan pencarian pengetahuan dari seseorang, dan kemajuan dalam

penciptaan alat untuk mengakses dan menyebarkan pengetahuan baru. Selanjutnya dari faktor-faktor tersebut dibuat rumusan untuk menggambarkan bentuk transisi masyarakat informasi, yaitu: (1) Masyarakat pratransi informasi. Masyarakat belum menikmati pendidikan dan sarana pendidikan belum tersedia, sehingga belum ada upaya penyebaran pengetahuan dikarenakan adanya keterbatasan cara berpikir sebagai akibat rendahnya pendidikan. (2) Masyarakat transisi awal. Sudah terdapat pendidikan formal, walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. (3) Masyarakat transisi menengah. Masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan formal, partisipan pendidikan dasar sudah meningkat. (4) Masyarakat transisi akhir. Masyarakat mulai berpartisipasi pada pendidikan tingkat menengah. (5) Masyarakat mulai maju. Anak-anak dalam masyarakat sudah mengenyam pendidikan dasar. (6) Masyarakat maju lanjut. Masyarakat sudah mengenyam pendidikan dasar dan menengah, serta sebagian telah memasuki perguruan tinggi. (7) Masyarakat super maju. Pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama, dan masyarakat sudah mengenyam pendidikan formal hingga perguruan tinggi ataupun pendidikan non formal. Indonesia dengan wilayahnya yang luas memungkinkan adanya perbedaan bentuk transisi masyarakat informasi pada daerah yang berbeda.

Untuk masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, mereka dengan kemudahan akses pendidikan serta kemudahan akses teknologi informasi sudah masuk dalam kategori masyarakat super maju. Untuk melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kehadiran suatu informasi, ada tiga jenis tingkatan (Wiyarsih, 2007) yaitu; (1) Masyarakat sadar informasi. Masyarakat yang menyadari bahwa informasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing, misal nelayan yang akan pergi kelaut mencari informasi tentang cuaca yang akan dihadapi. (2) Masyarakat kaya informasi. Masyarakat yang sudah cukup banyak memiliki informasi, sehingga memiliki daya saing, contoh masyarakat yang memiliki dunia usaha. Masyarakat kaya informasi telah memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi. Informasi yang menyesatkan tidak mudah menipu mereka, serta mampu

mengumpulkan informasi yang cukup banyak dan menyeleksi kebenarannya. (3) Masyarakat berbasis pengetahuan (*Knowledge Based Society*). Masyarakat yang kaya informasi, dengan mengambil keputusan yang didasari oleh pengetahuan, dimana pengetahuan cukup memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Banyaknya informasi yang diperoleh selanjutnya diolah menjadi pengetahuan, jadi pengetahuan merupakan tingkatan lebih lanjut dari informasi. Masyarakat pada tahap ini dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, contohnya kita dapat cek saldo tabungan kita melalui *handphone* yang dimiliki, juga akses internet untuk melihat-lihat website yang diinginkan.

Penelitian ini mengambil studi kasus penggunaan *website* kemendesa.go.id di kalangan aparatur desa di wilayah Kabupaten Bogor. Sepuluh desa terpilih dalam proses pelaksanaan wawancara dan observasi, adalah desa-desa yang masuk dalam 4 wilayah kecamatan, yaitu Parung, Bojong Sempu, Bojong Indah, Bantarjaya, Waru, Ciseeng, Cibentang, Cikeas Udik, Wanaherang, dan Cicadas. Terhadap aparat desa ditanyakan seputar tentang pengetahuan tentang *website* Kemendesa, frekuensi akses internet atau *website* Kemendesa, pengetahuan tentang program prioritas desa, serta informasi pembangunan desa lainnya.

Karakteristik suatu studi kasus meliputi hal-hal berikut (Creswell, 2013) : 1) mengidentifikasi kasus untuk keperluan suatu studi, 2) kasus yang diambil merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan waktu dan tempat, 3) menggunakan bermacam sumber informasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa, dan 4) menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.

Website kemendesa.go.id dalam kasus ini berusaha mensosialisasikan program-program dari Kemendesa. Program-program tersebut merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah melalui Kemendesa dalam rangka meningkatkan pembangunan di pedesaan. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai difusi inovasi. Difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka

waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial (Rogers, 1983). Tujuannya adalah diadopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial tertentu.

Dalam studi kasus penelitian ini, program Kemendesa yang disosialisasikan merupakan inovasi yang selanjutnya dikomunikasikan melalui media internet kepada aparat desa di wilayah Kabupaten Bogor yang dilakukan pada bulan April 2018. Penelitian ini mengkaji keefektifan media yang digunakan untuk menginformasikan program-program Kemendesa. kriteria penyebaran informasi yang efektif dan sukses adalah 1) tingkat pencapaian audiens, 2) ingatan (*recall*) khalayak terhadap isi informasi yang diberikan, dan 3) pemahaman (*comperhension*) khalayak terhadap hal-hal khusus yang terdapat dalam informasi (McQuail, 1993:85).

DISKUSI

Program Kemendesa

Website kemendesa.go.id menampilkan berbagai informasi yang berguna, khususnya bagi aparat desa yang bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan di desa masing-masing. Kemendesa.go.id memberikan informasi tentang berbagai kegiatan Kemendesa di berbagai wilayah di Indonesia dan menjelaskan empat program prioritas dalam pembangunan desa. *Website* ini juga memberikan contoh tentang pemanfaatan dana desa, seperti pengurangan gizi buruk dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, di mana kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah: a) pembangunan / rehabilitasi poskedes, polindes, dan posyandu, b) pembangunan MCK, c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, d) pembangunan sanitasi dan air bersih, serta e) pengadaan alat-alat kesehatan. Website tersebut juga memperkenalkan penggunaan berbagai sistem informasi (SI) aplikasi publik yang meliputi SI Daerah Tertinggal dan Tertentu (SI DTT), SI Potensi Desa (SI PODES), SI Desa Online, dan aplikasi internal yang meliputi SI Monitoring Desa, SI Persuratan, SI Kepegawaian, E-Perjalanan Dinas, dan lainnya. Selain itu, website juga menjadi sarana pengaduan, baik melalui telepon maupun pesan singkat (sms).

Program yang disosialisasikan oleh Kemendesa melalui *website*-nya sudah cukup menarik dan lengkap. Keberhasilan sosialisasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh media yang digunakan, melainkan tema program yang diperkenalkan (Prabowo, 2017), diantaranya apakah informasi tersebut menjadi agenda masyarakat yang menjadi target sasaran. Tantangan pemerintah dalam mensosialisasikan suatu program adalah menjadikan isu tersebut menjadi isu yang menarik perhatian secara nasional. Isu tersebut harus didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan nilai beritanya, seperti isu-isu di media yang merebut perhatian masyarakat. Pemerintah membutuhkan tema yang menarik dalam pemberitaan untuk mensosialisasikannya.

Akses *Website* kemendesa.go.id

Hampir semua desa menyatakan jarang mengakses kemendesa.go.id. Pada dasarnya, semua desa pernah diperkenalkan keberadaan *website* dari kemendesa, akan tetapi untuk selanjutnya mereka jarang menggunakannya. Akses dilakukan sesekali untuk melihat adanya program atau informasi yang baru. Hasil observasi menunjukkan keberadaan sarana untuk mendukung penggunaan akses internet masih kurang, diantaranya keberadaan kuota internet yang terbatas membuat penggunaan akses internet dibatasi untuk hal-hal yang memang sangat diperlukan, misal untuk pelaporan penggunaan keuangan. Sistem keuangan desa sudah dilaksanakan secara *online*, melalui pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Aparat desa yang sering melakukan akses komputer *online* adalah staf keuangan atau bendahara desa serta sekretaris desa.

Dari jawaban beberapa aparat desa ketika ditanyakan tentang frekuensi pengaksesan kemendesa.go.id sebagian besar menjawab rata-rata dua kali seminggu mereka mengakses kemendesa.go.id dengan tujuan untuk melihat informasi terbaru dari kemendesa, meskipun ada juga aparat yang jarang mengakses *website* tersebut, dengan menyatakan "*Pernah dulu setelah mendapat pelatihan, setelah itu jarang dibuka lagi*".

Program Prioritas Desa

Program prioritas desa yang dipahami oleh aparat desa secara umum adalah program yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah tabel program prioritas yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Tabel 1. Program Prioritas Desa

Desa	Prukades	BUMDes	Embung	Sarana Olah Raga
Parung	Tempe, tahu, <i>nugget</i>	Pemanfaatan sampah menjadi barang berguna	Situ Lebak Wangi	Lapangan bulutangkis, sepak bola
Bojong Sempu	Tahu, tempe, pindang ikan, souvenir	-	-	Lapangan bulutangkis, sepak bola, bola voley
Bojong Indah	Konveksi, makanan ringan	-	-	-
Bantar Jaya	Dodol jambu, tanaman jambu	Aset (tanah)	Situ alam	-
Waru	Pertanian, pindang ikan	-	-	-
Ciseeng	Perikanan, peternakan	Fotokopi (atk), Desa wisata	-	-
Cibentang	Ayam kuning, kangkung	-	-	
Cikeas Udik	Pertanian papaya	-	-	Lapangan bulutangkis
Wanaherang	Kripik organik	Gedung serbaguna	-	Lapangan futsal
Cicadas	Kripik	Kerajinan tangan	-	-

Semua desa memiliki Program Unggulan Kawasan Desa (Prukades), walaupun sebagian kecil kondisinya kurang aktif

karena faktor kurangnya permodalan. Sebagian desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bagi sebagian desa yang belum memiliki disebabkan karena kurangnya dana sebagai modal awal memulai usaha. Keberadaan embung desa disiasati dengan memanfaatkan situ alam yang sudah ada bagi desa yang memilikinya, sedangkan sebagian desa lainnya belum memiliki embung. Hal ini disebabkan juga wilayah Kabupaten Bogor bukan wilayah yang kering atau rawan air, sehingga keberadaan embung tidak terlalu diprioritaskan. Sedangkan untuk sarana olahraga, sebagian besar desa sudah memiliki sarana olah raga, walaupun kondisi fisiknya ada yang bagus dan ada yang belum bagus. Keberadaan Prukades, BUMDes, dan embung desa merupakan program prioritas desa yang sudah disosialisasikan melalui kemendesa.go.id.

Informasi yang diberikan oleh kemendesa.go.id diantaranya adalah pendirian badan usaha milik desa, usaha yang dibentuk dapat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Kemendesa juga menginformasikan keberhasilan yang diperoleh oleh desa. Kemendesa dalam rangka mendapatkan keberhasilan dalam mensosialisasikan program-programnya perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut; komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi.

Pemanfaatan Dana Desa

Informasi tentang pemanfaatan dana desa lebih banyak diketahui aparat desa dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Bogor. Mereka menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan juga melakukan pelaporan penggunaan anggaran melalui OMPAN (*Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.

Hasil jawaban dari pertanyaan tentang pengetahuan pemanfaatan dana desa dan dari mana mendapat sumber informasi memperlihatkan bahwa sepengetahuan aparat desa, dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. Mereka mendapat informasi tersebut melalui *group* antar desa yang mereka bentuk melalui media sosial, serta informasi dari DPMD

Kabupaten Bogor. Salah satu jawabannya sebagai berikut, "informasi kita dapat dari mitra desa dibawah DPMD dan dari WA (*whatsapp*) group".

Kemendesa.go.id juga memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa yang telah dilakukan oleh desa-desa di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya pemanfaatan dana desa untuk pembangunan jalan, gorong-gorong, dan lainnya, dimana masyarakat bekerja sama dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui bantuan tenaga kerja. Kemendesa.go.id seharusnya juga menginspirasi dan memotivasi pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang disampaikan. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dicapai secara instan (Sulistiyani, 2004), diperlukan tahapan-tahapan yang akhirnya masyarakat sampai pada kondisi yang dinamakan berdaya.

Tahap pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku, dimana pihak pemberdaya berusaha menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi berjalannya proses pemberdayaan yang efektif, yang diharapkan masyarakat mencapai kesadaran yang diharapkan. Sehingga diperoleh keikutsertaan dan kepedulian masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan.

Tahap kedua adalah transformasi kemampuan, tahap ini masyarakat menjalani proses belajar mengenai pengetahuan dan kecakapan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan. Masyarakat desa dapat berpartisipasi terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta evaluasinya.

Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan, tahap ini masyarakat perlu peningkatan intelektualitas dan keterampilan yang diperlukan, agar memiliki kemampuan kemandirian yang melahirkan inisiatif, kreasi-kreasi, dan inovasi-inovasi dalam lingkungannya, yang akhirnya masyarakat akan secara mandiri melaksanakan pembangunan di desanya. Dalam konsep pembangunan pada kondisi seperti ini masyarakat didudukkan sebagai subyek pembangunan dan pemerintah berfungsi sebagai *fasilitator*. Berkaitan dengan kebijakan alokasi dana desa, pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk berinisiatif dalam membantu pembiayaan kegiatan pembangunan di desa, serta memberikan kesempatan

masyarakat guna mengembangkan usaha dengan sumber dari pembiayaan mandiri.

Informasi dan Publikasi Pembangunan Desa

Sebagian desa telah memiliki portal desa di media sosial seperti Facebook, sehingga publikasi pembangunan desa dapat dilakukan melalui media sosial Facebook agar warga desa juga dapat mengaksesnya. Selain itu juga ada forum antar desa yang difasilitasi media sosial WA, sehingga antara aparat desa bisa saling berbagi hasil pembangunan yang dilakukan di desa masing-masing. Mempublikasikan pembangunan yang dilakukan di desa juga merupakan keharusan, karena merupakan syarat dalam laporan kegiatan penggunaan dana desa yang diunggah melalui aplikasi OMPAN. Hal-hal tersebut adalah salah satu faktor kurangnya akses terhadap kemendesa.go.id, karena informasi publikasi pembangunan desa bisa didapatkan aparat desa melalui media yang lain.

Jawaban yang diperoleh dari pertanyaan tentang bagaimana aparat desa mengetahui pembangunan yang dilakukan desa lainnya dan bagaimana mempublikasikan pembangunan di desanya, salah satu jawabannya "informasi pembangunan kita dapat dari akun *Facebook* Desa atau grup mitra desa sekabupaten bogor melalui media sosial".

Berkaitan dengan publikasi pembangunan desa, kemendesa.go.id seharusnya juga menginformasikan tentang jaringan kerja antardesa dalam rangka berdaulat pada aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan teknologi. Pengetahuan tentang strategi melaksanakan praktik pengelolaan desa yang baik, yang meliputi aspek pengelolaan program pembangunan, administratif, pelayanan publik, dan pembangunan desa yang berbasis internet. Ke depannya inisiatif desa-desa yang ingin membangun desanya sendiri perlu didukung *stakeholders* terutama pemerintah, serta dukungan perguruan tinggi, LSM, swasta, dan juga praktisi teknologi informasi. Apalagi dengan berlakunya UU Desa menjadikan potensi pembangunan desa dengan berbasis internet ke depan akan semakin baik dan tidak akan mengalami kesenjangan dalam pembangunan serta akses terhadap informasi. Sistem Informasi Desa (SID) perlu menampung jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat desa,

seperti informasi ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan termasuk juga hukum waris dan pertanahan, serta pendidikan (Hartoyo, 2016).

Pelaporan atau Pengaduan

Website kemendesa.go.id memberikan akses seseorang untuk melakukan pengaduan sehubungan dengan desa, baik melalui pesan singkat (sms) ataupun telepon. Akan tetapi berdasar hasil wawancara semua aparat desa tidak pernah menggunakan fasilitas pengaduan tersebut. Menurut para aparat desa, jika ada hal yang ingin disampaikan atau dilaporkan mereka menggunakan mekanisme jalur komunikasi dengan atasan yang ada, misal berkomunikasi dengan aparatur tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Aparat desa tidak berani melakukan pelaporan atau pengaduan secara langsung kepada pihak kementerian atau pemerintah, karena takut akan melakukan kesalahan dalam pelaporan tersebut atau tidak mendapatkan izin dari atasannya langsung.

Jawaban atas pertanyaan bagaimana sistem pelaporan atau pengaduan permasalahan yang ada di desa, salah satunya menyatakan "*cara melaporkan apa yang ingin disampaikan dilakukan secara online, berawalnya dari tingkat Kecamatan dan nantinya dari Kecamatan disampaikan ke Pemda*".

KESIMPULAN

Penggunaan dan akses aparat desa terhadap *website* kemendesa.go.id belum optimal. Aparat desa mendapat informasi seputar pembangunan desa lebih banyak melalui group media sosial yang dimilikinya. Keterbatasan penggunaan kuota internet juga memungkinkan aparat selektif dalam memilih *website* atau aplikasi yang diakses. Dengan keterbatasan tersebut aparat desa cenderung memilih tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam hal akses internet. Disisi lain aparat desa memiliki group media sosial yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan desa dari sumber yang lain, tidak langsung mendapatkan informasi dari *website* kemendesa.go.id. Karena jarang diaksesnya *website* kemendenesa.go.id, maka publikasi

pembangunan di desa pun dilakukan hanya pada portal desa masing-masing di media sosial, group jaringan media sosial, serta sebagai bukti kegiatan penggunaan dana desa pada laporan informasi yang disampaikan kemendes.go.id tidak mencapai target atau belum berhasil, karena aparat desa tidak mengingat isi informasi yang disampaikan dari *website* tersebut, serta tidak mengetahui hal-hal spesifik yang diinformasikan. Realitas yang ada bukanlah tidak ada akses internet, tetapi keterbatasan penggunaan internet, akses internet diperuntukkan untuk hal-hal yang diprioritaskan. Situasinya akan berbeda jika akses internet bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja di lingkungan aparat desa. Untuk kedepannya pihak desa harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan akses komputer di desanya, khususnya untuk kebutuhan akses internet para aparat desa.

Gambaran masyarakat informasi menurut Castell nampak pada masyarakat di lingkungan Kabupaten Bogor, khususnya dalam aktivitas di lingkungan kerja, para aparat desa sudah menggunakan teknologi komunikasi seperti komputer dan *handphone*, dan terjadi komunikasi atau berbagi informasi dengan sesama aparat di desa lainnya yang akhirnya membentuk masyarakat jaringan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi akan menyederhanakan pengorganisasian kerja serta membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki ketrampilan teknis di bidang teknologi komunikasi. Merujuk pada pembagian tiga kategori masyarakat informasi berdasar aspek penerimaan informasi. Aparat desa yang menjadi informan penelitian ini masuk dalam kategori masyarakat kaya informasi, mereka memiliki banyak informasi tetapi belum pada kondisi adanya kemudahan akses internet, khususnya untuk kepentingan kelancaran pekerjaan.

REFERENSI

Beni, R. (2002). *Transisi Masyarakat Informasi Indonesia*, dalam Kumpulan Artikel Alumni dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan. Program Pascasarjana FIB Universitas Indonesia.

- Castells, M.. (1996). *The Rise of The Network Society (The Information Age: Economy, Society, and Culture)*. London: Willey-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. Third Edition. United States of America: SAGE Publications Ltd
- Gomez, M. & Velez, I. S. (2011). Social Media as a Strategic Tool for Corporate Communication. *Revista Internacional De Relaciones Públicas*, 2(1). Pg 157-174.
- Hartoyo, M. dan Merdekawati, I. (2016). Citalinuabdi: Upaya Membangun Sistem Informasi Desa Yang Bermakna. *Jurnal Komunikasi*, 1. Pg 48-57.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- McQuail, D. and Windahl, S. (1993). *Communication Models: For The Study of Mass Communication*. 2 nd Edition. New York: Longman Inc.
- Prabowo, A. dan Kurnia, A. (2017). Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital. *ASPIKOM*, 3(2). Pg 256-269.
- Puspitasari, N.A. (2013). Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kanwil DJP Jawa Timur I). *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Rogers, E. M . (1983). *Diffusion of Innovation*. New York : The Free Press, A Division of Macmillan Publishing C., Inc.
- Sharon, A. (2017). Manfaat Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Masyarakat di Kecamatan Sario. *E-journal "Acta Diurna"* , 6(1).
- Soon, C. and Yi D, S. (2014). Engagement@web 2.0 between the government and citizens in Singapore: dialogic communication on Facebook?. *Asian Journal of Communication*, 24(1). Pg 42-59.
- Sugiharti, R. (2014). *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group

Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Van Dijk, J.&Van Deursen, A. (2010). *Internet skills and the digital divide. New media & society*. Retrieved from sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav

Wiyarsih. (2008). *Menuju Masyarakat informasi*. Diunduh dari <http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id/wp/?p=16>